

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS WPOP PEKERJA BEBAS DI KPP MALANG SELATAN)**

Disusun Oleh:
Ghea Nindya
NIM. 145020301111018

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Derajat Sarjana Ekonomi*



JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul:

“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, Keadilan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP Pekerja Bebas di KPP Malang Selatan)”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberi nikmat, kesehatan, kelancaran dan juga perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi tepat pada waktunya.
2. Papa Teguh Karyono dan Mama Evilita Ratnawati yang selalu mendukung penuh dalam proses penyelesaian skripsi dan selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Dr. Lilik Purwanti, M. Si., Ak selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini

4. Prof. Dr. Sutrisno T., Ak., CA selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
5. Ibu Nurlita Novianti, MSA., Ak., CA selaku dosen penguji 2 (dua) yang juga banyak membantu masukan di dalam perbaikan skripsi.
6. Keluarga besar yang selalu mendukung dalam menyelesaikan skripsi (nenek, mbah uti, seluruh om dan tante, kak bila, dek nana, sendi dan semua adek-kakakku)
7. Teman-temanku ben5 dan seluruh teman di Pontianak yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
8. Teman yang selalu menemani saat di Malang (Dwi, Dika, Dayinta, Raden, Dhella, Annisa, Agung, Budi, Ihsan, Yayank, warga pabir) dan seluruh teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Malang, 19 April 2018

Penulis

RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : Ghea Nindya
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 4 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Lajang
Alamat Asal : Jalan Arteri Supadio. Gang. Ringin Sari 1, RT/ RW 010/010, Kelurahan Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kal-Bar
Alamat Kos : Jalan Papa Biru No.16, Kota Malang
Alamat Email : gheanindya4@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2002-2008 : Min Bangka Belitung
2008-2011 : SMP 10 Pontianak
2011-2014 : SMA 1 Pontianak
2014-2018 : S1 Akuntansi FEB, Universitas Brawijaya

PENGALAMAN NON-FORMAL

- 2016 Olimpiade Brawijaya
- 2016 Sparkling Ecora
- 2016 Student Conference
- 2015 Pemilwa
- 2015 Sparkling Ecora
- 2015 KM FEB 2
- 2014 Charity Event HMJA FEB



ABSTRAK**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS WPOP PEKERJA BEBAS KPP MALANG SELATAN)****Oleh:****Ghea Nindya****Dosen Pembimbing: Dr. Lilik Purwanti, M.Si.,Ak.**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, keadilan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di wilayah KPP Malang Selatan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, keadilan pajak dan sanksi pajak sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner yang dapat diolah pada penelitian ini sebanyak 97 data dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *non probability*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Alat analisis dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square* melalui SmartPLS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, keadilan pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

**THE EFFECT OF TAX KNOWLEDGE, TAX FAIRNESS AND TAX
PENALTIES ON TAXPAYER COMPLIANCE
(A Case Study on Independent Worker Taxpayers in the Southern Malang
Tax Office)**

By:

Ghea Nindya

Supervisor: Dr. Lilik Purwanti, M.Si., Ak.

This research examines the influence of tax knowledge, tax fairness and tax penalties on the compliance of independent worker taxpayers in Southern Malang Tax Office. The independent variables of this research are tax knowledge, tax fairness and tax penalties while the dependent variable is independent worker taxpayer compliance. This quantitative research uses primary data obtained from questionnaires distributed to a number of samples selected using non-probability sampling. The data from 97 legible questionnaires were analyzed using Partial Least Square in SmartPLS. The result shows that tax knowledge and tax fairness positively influence taxpayer compliance, while tax penalties do not have any effect.

Key Terms: Tax Knowledge, Tax Fairness, Tax Penalties, taxpayer compliance

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Konsep Pajak.....	11
2.1.1 Pengertian Pajak.....	11
2.1.2 Fungsi Pajak.....	12
2.1.3 Pengelompokan Pajak	14
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2.2 Wajib Pajak	18

2.3 Surat Pemberitahuan	19
2.4 Kepatuhan Pajak.....	21
2.4.1 Pengetahuan Pajak	22
2.4.2 Keadilan Pajak	25
2.4.3 Sanksi Pajak	27
2.4.4 Teori Atribusi.....	31
2.5 Kerangka Konseptual Penelitian	32
2.6 Pengembangan Hipotesis	33
2.6.1 Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.....	33
2.6.2 Pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.....	33
2.6.3 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	34
2.7 Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Rancangan Penelitian.....	43
3.2 Populasi.....	43
3.3 Sampel.....	44
3.4 Sumber Data.....	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6 Variabel dan Indikator Penelitian.....	47
3.6.1 Variabel Bebas	47
3.6.2 Variabel Terikat	52
3.7 Metode Analisis Data.....	53
3.8 Metode Spesifikasi	55

3.9 Evaluasi Model Hipotesis Penelitian	57
3.9.1 <i>Outer Model</i>	57
3.9.2 <i>Inner Model</i>	58
3.10 Hasil Pilot Test.....	59
3.10.1 Hasil Uji Validitas.....	59
3.10.2 Hasil Uji Reliabilitas	63
BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	65
4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	65
4.2 Deskriptif Jawaban Responden	69
4.2.1 Tanggapan responden terhadap pengetahuan pajak.....	70
4.2.2 Tanggapan responden terhadap keadilan pajak	70
4.2.3 Tanggapan responden terhadap sanksi pajka	71
4.2.4 Tanggapan responden terhadap kepatuhan wajib pajak.....	72
4.3 Evaluasi Model Hipotesis Penelitian	73
4.3.1 Uji <i>outer model</i>	74
4.3.2 Uji <i>inner model</i>	78
4.4 Pengujian Hasil Hipotesis	79
4.5 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis	80
4.5.1 Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.....	81
4.5.2 Pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.....	82
4.5.3 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	83
BAB V PENUTUP.....	85
5.1 Kesimpulan	85

5.2 Keterbatasan Penelitian.....	86
5.3 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang atau biasanya lebih dikenal dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya pembangunan yang berkesinambungan, dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa serta negara dengan maksud untuk mewujudkan tujuan nasional. Pemerintah memerlukan dana yang sangat besar untuk melakukan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk mengelola pendapatan maupun pengeluaran yang akan dikeluarkan untuk kepentingan negara dengan baik. Pengeluaran yang utama untuk negara tersebut meliputi pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan, pengeluaran infrastruktur dan pengeluaran pembangunan lainnya.

Salah satu sumber pendapatan negara yang didapat oleh Indonesia berasal dari pajak. Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga 15 Desember 2017 mencapai Rp 1.058,41 triliun atau 82,46 persen dari target APBN-P 2017. Hal ini membuktikan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Melihat begitu pentingnya peran pajak untuk pembangunan, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Langkah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, saat itu Indonesia mulai menganut *self assessment system*. Penerapan *self assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004). Penerapan sistem *self assesment system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penerapan *self assesment system* hanya akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela pada masyarakat telah terbentuk. Kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak nampak masih belum maksimal. Salah satu alasannya dikarenakan masyarakat atau wajib pajak mengalami kesulitan dalam menerapkan *self assesment system*, dimana wajib pajak dituntut untuk menghitung/ memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bukanlah pekerjaan yang mudah. Segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti memberikan penyuluhan dan pendidikan mengenai perpajakan tetapi hal ini tidak berdampak banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya,

jika wajib pajak tidak merasakan manfaat dari kepatuhannya membayar pajak. Disisi lain ancaman hukuman yang kurang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh juga menyebabkan wajib pajak banyak yang cenderung untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya. Disamping itu, berhasil atau tidaknya pemerintah menghimpun dana dari sektor pajak tidak semata-mata tergantung pada aparat perpajakan saja tetapi justru tergantung dari kemauan wajib pajak, atau istilah perpajakannya kepatuhan dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Menurut Marti (2010) kepatuhan pajak adalah istilah yang kompleks untuk didefinisikan. Kepatuhan pajak mengacu pada semua kewajiban pajak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Kepatuhan wajib pajak ini mencakup kepatuhan mencatat, melaporkan serta membayar pajak penghasilan sesuai undang-undang yang berlaku. Berdasarkan penelitiannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak yang meliputi pemahaman atau pengetahuan pajak tentang sistem pajak atau undang-undang perpajakan, rasa adil terhadap sistem pajak yang diterapkan dan penerapan sanksi atau denda pajak.

Penelitian Dyah, *et.al* (2015) dilakukan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan Basit (2014), yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Disebutkan dalam penelitiannya hal tersebut karena pengetahuan tentang perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh karena dengan bertambahnya wawasan tentang

perpajakan wajib pajak mampu memberikan kesadaran akan pentingnya pajak bagi mereka, masyarakat dan negara. Disamping itu tanpa pengetahuan pajak wajib pajak tidak akan mungkin patuh karena mereka tidak mengetahui peraturan perpajakan, bagaimana cara menghitung pajak terutang, kapan dan dimana harus membayar pajak, kapan dan dimana harus melapor pajak agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penelitian ini tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan Damajanti (2015), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor keadilan pajak yang diberikan kepada wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2014) untuk menguji pengaruh sikap, norma subjektif dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa sikap, norma subjektif dan keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Asbar (2014), yang menyatakan bahwa teori keadilan mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak. Keadilan pajak merupakan salah satu hal penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu penerimaan pajak. Semakin tinggi keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap pajak maka akan meningkatkan kesukarelaan untuk membayar pajak dengan kata lain semakin kecil keinginan untuk berperilaku tidak patuh dan sebaliknya semakin rendah keadilan yang dirasakan terhadap sistem perpajakan maka niat untuk tidak patuh semakin tinggi. Penerapan sistem perpajakan yang adil menjadi salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian ini tidak sejalan dengan Syahdan dan Rani (2014), yang menyatakan

bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak. Penelitiannya menyatakan bahwa yang lebih mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah ketatnya sistem perpajakan yang berlaku dibandingkan persepsi mereka mengenai keadilan perpajakan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi yang akan diterima oleh pelanggar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Septarini (2015) untuk menguji pengaruh pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawirasuta & Setiawan (2016), yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan Harefa (2013), pada penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruroh (2013), pada penelitiannya yang dilakukan untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak mendapatkan hasil bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Meskipun penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak ini sudah banyak dilakukan di Indonesia seperti beberapa penelitian yang telah dijelaskan secara singkat di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan

mengkombinasikan beberapa variabel dari penelitian di atas. Selain itu, perbedaan tahun penelitian yang tentu didukung dengan perbedaan kondisi dahulu dan sekarang menjadi salah satu faktor keinginan untuk melakukan penelitian ini. Sasaran dalam penelitian ini difokuskan kepada WPOP pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan. Penelitian yang dilakukan kepada WPOP pekerja bebas ini didasari karena ikut berperan besar terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Alasan penelitian di KPP Pratama Malang Selatan adalah KPP Pratama Malang Selatan memiliki jumlah WPOP terbesar di Malang sehingga diharapkan dari jumlah WPOP yang semakin besar, maka data yang didapatkan akan semakin akurat. Hal tersebut membuat peneliti tertarik dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Malang Selatan. Alasan lain adalah wajib pajak pekerja bebas di KPP Malang Selatan mengalami penurunan persentase setiap tahunnya. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti kepatuhan wajib pajak pekerja bebas dengan menggunakan beberapa variabel yang telah dijelaskan di atas. Jumlah wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di KPP Malang Selatan terus bertambah mulai dari tahun 2013 wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar wajib SPT sebanyak 10.511 dan realisasi SPT sebanyak 5.935. Untuk tahun 2014 wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar wajib SPT sebanyak 11.621 dan realisasi SPT sebanyak 6.120. Untuk tahun 2015 wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar wajib SPT sebanyak 12.665 dan realisasi SPT sebanyak 6.172. Dan untuk tahun 2016 wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar wajib SPT sebanyak 14.280 dan realisasi SPT sebanyak 5.914. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan pada tahun

2013-2015 jumlah realisasi SPT naik tiap tahunnya namun untuk tahun 2016 realisasi SPT menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berikut rincian data jumlah wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan yang akan ditampilkan pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan

Tahun	Jumlah WPOP Pekerja Bebas Terdaftar SPT	Jumlah WPOP Pekerja Bebas yang Menyampaikan SPT	Persentase Kepatuhan
2013	10.511	5.935	56,46%
2014	11.621	6.120	52,66%
2015	12.665	6.172	48,73%
2016	14.280	5.914	41,41%

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan, 2017.

Dilandasi seluruh pemikiran di atas dan penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Malang Selatan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan terhadap pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas?
2. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas?

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas.
2. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan terkait pengetahuan pajak, keadilan pajak dan sanksi pajak. Serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai perpajakan khususnya mengenai hal-hal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak penghasilan di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan masukan bagi pemerintah di bidang perpajakan terkait pengetahuan pajak, keadilan pajak dan sanksi pajak sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara yang diperoleh dari pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab landasan teori, bab metode penelitian, bab pembahasan dan hasil penelitian, serta bab penutup. Berikut adalah penjelasannya:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya di KPP Pratama Malang Selatan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab 2 Kajian Pustaka

Bab ini akan membahas mengenai variabel penelitian dan pengukurannya, model penelitian dan pengembangan hipotesis atau bagan model penelitian

Bab 3 Metodologi Penelitian

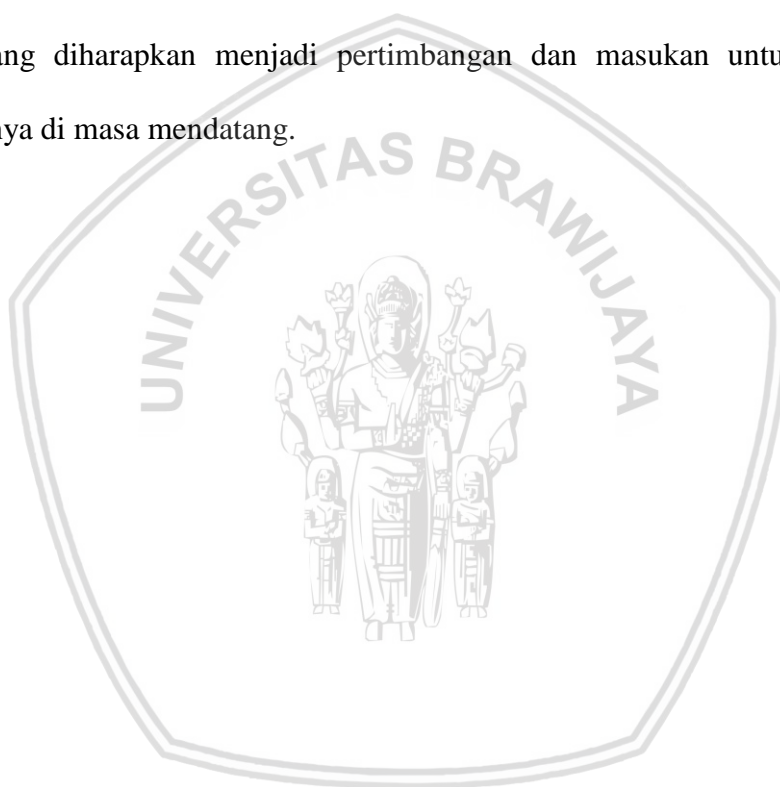
Bab ini berisikan data dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi populasi dan sampel penelitian, data penelitian dan sumber-sumbernya serta definisi operasional dan pengukuran variabel metode analisis data dan pengujian hipotesis.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan latar belakang Institusional objek penelitian yaitu KPP Pratama Malang Selatan, menyajikan hasil pengujian data serta hasil analisis penelitian yang dilakukan.

Bab 5 Penutupan

Bab ini membahas kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini serta memuat saran yang diharapkan menjadi pertimbangan dan masukan untuk penelitian selanjutnya di masa mendatang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pajak

Salah satu sumber penghasilan di Indonesia adalah berasal dari pajak. Di Indonesia sendiri, pajak merupakan sumber terbesar penerimaan negara. Pajak merupakan iuran yang diberikan rakyat kepada negaranya, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung namun nantinya akan digunakan untuk pembangunan negara dan kemakmuran rakyat.

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Sumarsan (2012: 4), menyatakan pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sedangkan, menurut Andriani dalam Sumarsan (2012: 3), menyatakan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013: 1), menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Priantara (2012: 4), mengungkapkan bahwa terdapat 2 (dua) fungsi pajak. Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Dua macam fungsi pajak tersebut adalah:

1. Fungsi *Budgetair* (Pendanaan)

Fungsi *Budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini

disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. Fungsi *Budgetair* adalah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi *Regulair* (Mengatur)

Fungsi *Regulair* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi Pemerintah. Untuk mencapai tujuan tertentu maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun bukan sebagai fungsi utama, fungsi *regulair* pada ekonomi makro merupakan hal penting sebagai instrumen kebijakan fiskal dari Pemerintah yang menjadi mitra kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia).

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulair*. Fungsi *budgetair* dapat dikatakan dengan fungsi utama pajak, artinya pajak merupakan satu sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Contohnya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan sebagainya. Fungsi kedua pajak adalah fungsi *regulair* yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pmerintahan dalam

bidang sosial dan ekonomi serta tujuan-tujuan lain di luar bidang keuangan. Contohnya adalah tarif pajak progresif dan sebagainya.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Resmi (2017: 7), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. Berikut ini adalah pembagian jenis pajak berdasarkan kriterianya:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban WP yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/ kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan untuk Pajak Kabupaten/ Kota meliputi Pajak Hotel Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan penjelasan diatas, jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut Golongan pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak sedangkan, untuk pajak tidak langsung adalah pajak pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Menurut sifatnya, jenis pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak

objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya, setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya. Pajak objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya terlebih dahulu. Terakhir adalah menurut lembaga pemungutnya yang dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2017: 10) menyatakan system pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut:

1. *Official Assessment Sytem*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini merupakan kegiatan menghitung dan memungut pajak yang sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk (peranan dominan ada pada pihak ketiga).

Ketiga sistem ini digunakan secara terintegrasi pada sistem pemungutan pajak di Indonesia. *Self Assessment System* berlaku ketika wajib pajak melaksanakan administrasi perpajakan yang menjadi kewajibannya (menghitung, memperhitungkan, dan menyetor pajak terutang). Saat bersamaan, jika posisi wajib pajak adalah pemungut atau pemotong karena berkedudukan sebagai pemberi kerja atau pihak yang berwenang memungut pajak, maka *With Holding System* juga digunakan sedangkan *Official Assessment Sytem* berlaku ketika fiskus melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) atas laporan wajib pajak.

2.2 Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2013: 23), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Tertentu, menyebutkan “Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja”. Berikut ini yang termasuk dalam pekerjaan bebas, antara lain:

1. Tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film;
3. Bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model;
4. Paragawan atau peragawati, pemain drama, dan penari;
5. Olahragawan;
6. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
7. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
8. Agen iklan;
9. Pengawas atau pengelola proyek;
10. Perantara;
11. Petugas penjaja barang dagangan;
12. Agen asuransi;
13. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya;

2.3 Surat Pemberitahuan

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang KUP dalam Suharsono (2015: 83), surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dibagi menjadi dua jenis yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak, batas penyampaian untuk SPT Masa adalah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah SPT Masa Pajak. Contoh dari SPT Masa adalah SPT Masa PPh 21, SPT Masa PPh 22, SPT Masa PPh 23 dll.

SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, batas penyampaian untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak dan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan adalah paling lama empat bulan setelah akhir Tahun Pajak. Contoh dari SPT Tahunan adalah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh final dan/ atau bersifat final dll.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi SPT adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang penghasilan yang merupakan objek pajak maupun yang bukan objek pajak, harta dan kewajiban termasuk pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPn dan PPnBM yang terutang.
3. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.4 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan dalam bahasa Indonesia memiliki arti mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku. Menurut Harinurdin (2009), kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material. Menurut Basit (2014), definisi kepatuhan dalam kaitannya dengan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa prosedur yang harus diikuti oleh wajib pajak agar dapat dikatakan patuh yaitu meliputi membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP), menghitung pajak yang terutang dengan benar dan tepat waktu, dan yang terakhir membayar pajak terutang di Bank Persepsi (bank yang ditunjuk) atau kantor post dan kemudian melaporkan SPT.

Berdasarkan definisi diatas menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 dalam Burton (2014: 35), menyebutnya beberapa kriteria dari wajib pajak yang dapat digolongkan sebagai wajib pajak yang patuh. Kriteria tersebut adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/ atau melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
2. Mengambil, mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar;
3. Wajib pajak membayaran pajak terutang tepat waktu;

4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah diperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

Beberapa iuran di atas dapat diartikan seorang wajib pajak dikatakan patuh ketika wajib pajak telah menyelesaikan kewajiban perpajakan dari mulai mendaftarkan diri, melaporkan pendapatan penghasilan hingga melakukan pembayaran pajak. Tidak hanya itu, wajib pajak dikatakan patuh apabila melaporkan dan membayarkan pajaknya dengan benar dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Di zaman reformasi pajak sekarang ini yang mana Indonesia telah menganut sistem pemungutan pajak *self-assessment*, kepatuhan pajak menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kesuksesan dari sistem ini. Wajib pajak diharapkan dengan diberinya keleluasaan dalam melaporkan dan membayar pajaknya sendiri dapat diiringi kepatuhan yang diterapkan diterapkan oleh wajib pajak. Beberapa faktor dalam penelitian ini yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengetahuan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah suatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran sehingga, pengetahuan pajak dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan.

Pengetahuan adalah suatu yang sangat penting dalam hidup bermasyarakat. Menurut Palil (2005), banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, tetapi pengetahuan pajak adalah pengaruh utama. Pengetahuan yang dimaksud

terkait dengan pengetahuan tentang sanksi dan denda, pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak, pengetahuan tentang penghasilan yang dikenakan pajak dan penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Hal ini agar wajib pajak dapat terhindar dari kecurangan, tipuan, dan perlakuan ketidakadilan yang tidak diketahui, maka dari itu pengetahuan merupakan sesuatu yang wajib dimiliki setiap individu. Kini untuk mendapatkan pengetahuan dan menambah wawasan sangatlah mudah, individu tidak hanya dapat mengandalkan buku tetapi juga dapat mengandalkan kemajuan teknologi yang ada seperti internet dan lain-lain.

Di dalam bidang perpajakan, minimnya pengetahuan pajak bisa menyebabkan kecurangan seperti manipulasi pajak atau bahkan kerugian bagi wajib pajak tersebut berupa tambahan setoran pajak. Menurut Basit (2014), pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak sedangkan menurut Damajanti (2015), pengetahuan perpajakan adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi pertama, kepemilikan NPWP. Menurut Resmi (2017: 24), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak, selain itu NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Kedua, mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Menurut Resmi (2017: 19), Wajib pajak sendiri adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Ketiga, pengetahuan mengenai sanksi pajak. Menurut Purwono (2010: 68), sanksi pajak merupakan wujud dari pelanggaran atas hak suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan. Keempat, pengetahuan tentang PKP, PTKP dan tarif pajak yang berlaku saat ini. Menurut Resmi (2017: 19), PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/ atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang pajak pertambahan nilai. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri, dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Menurut Menurut Purwono (2010: 32), terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan:

1. Kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana administrasi pajak.
2. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukan kewajiban tersebut, salah satunya adalah membayar pajak.

3. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.
4. Pengetahuan mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar.

2.4.2 Keadilan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang adil, tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Ketika wajib pajak merasa tidak adil dengan pajak yang dibayar maka akan mempengaruhi motivasi untuk berperilaku tidak patuh, dan begitu juga sebaliknya. (Asbar, 2014)

Salah satu yang harus diperhatikan pemerintah dalam rangka pemungutan pajak dari masyarakat adalah keadilan. Hal ini disebabkan karena pandangan beberapa masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban yang harus mereka tanggung. Masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajaknya oleh negara.

Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah selain memiliki sifat memaksa juga harus bersifat adil. Oleh karena itu prinsip pemungutan pajak yang baik salah satunya harus bersifat adil. Menurut Kurniawati dan Toly (2014), menjelaskan adanya empat standar dalam melakukan pemungutan pajak yang adil. Pertama, Prinsip manfaat (*benefit principle*) yaitu pajak merupakan mekanisme kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Kedua, kemampuan membayar (*ability to pay*) yaitu pajak yang dibayar seharusnya mencerminkan sumber daya ekonomi yang berada pada penguasaan wajib pajak. Ketiga, keadilan horizontal (*horizontal equity*) yaitu wajib pajak yang memiliki basis pajak sama mendapat perlakuan pajak yang sama. Keempat, keadilan vertikal (*vertical equity*), pengenaan struktur tarif terhadap wajib pajak yang memiliki tingkat kemampuan lebih besar.

Dari keempat standar tersebut, Burton (2014: 189) menjelaskan lebih lanjut mengenai standar pajak yang adil memiliki empat kriteria:

1. Prinsip manfaat (*benefit principle*), menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat atau jasa-jasa yang diperoleh dari pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Keadilan dalam kemampuan membayar (*ability to pay*), memiliki arti bahwa wajib pajak akan membayar jumlah pajak yang terutang sesuai dengan kondisi wajib pajak.
3. Keadilan horizontal (*horizontal equity*), adalah persepsi kewajiban pajak yang dibayar dibanding orang lain yang memiliki jumlah kekayaan yang

sama atau dapat diartikan bahwa dalam pemungutan pajak tidak boleh ada diskriminasi.

4. Keadilan vertikal (*vertical equity*), merupakan kewajaran pajak yang dibayarkan wajib pajak dibandingkan orang lain yang memiliki kekayaan yang lebih. Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar.

2.4.3 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013: 59).

Sanksi perpajakan menjadi penting keberadaannya dikarenakan Indonesia telah menerapkan sistem *self assesment* dalam perpajakan dimana wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Agar sistem ini dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya suatu alat untuk membuat wajib pajak tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Resmi (2017: 66), salah satu cara dengan adanya sanksi, sanksi tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara dapat berupa denda, bunga dan sanksi berupa kenaikan sedangkan sanksi pidana dapat berupa denda pidana, kurungan dan penjara. Penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Oladipupo dan Obazee (2016), sanksi pajak adalah tindakan hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan atas pelaksanaan tindakan yang dilarang, atau karena kegagalan untuk melakukan tindakan yang diperlukan seperti kegagalan untuk mengembalikan atau mengisi pengembalian yang salah atau tidak tepat waktu. Menurut Purwono (2010: 68), sanksi pajak adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud nyata dari pelanggaran atas hak suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan.

Menurut Purwono (2010: 68), sanksi dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu:

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara berupa denda administrasi, bunga atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan.

a. Denda administrasi, sebesar:

- 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan 1.000.000 untuk wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar, dalam hal telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak dan terhadap ketidakbenaran tersebut dilakukan penyidikan, apabila wajib

pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

b. Bunga

Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenakan bunga 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi administrasi dengan kenaikan pajak adalah kenaikan pajak bisa menjadi berlipat ganda yang harus kita tanggung/ bayar. Wajib pajak harus membayar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB, dikarenakan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari Pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur

kesengajaan atau kelalaian/ pengabaian. Ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan atau pidana penjara.

a. Sanksi karena ketidaksengajaan/ kealpaan

Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali (yang telah dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) dikenakan pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

b. Sanksi karena sengaja

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberi NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, menyalahgunakan NPWP, tidak menyampaikan SPT dan seterusnya. Dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak berhati-hati atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

2.4.4 Teori Atribusi

Heider (1958) mengembangkan teori bernama teori atribusi, teori ini merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku seseorang yang akan ditentukan dari faktor internal dan faktor eksternal.

Teori Atribusi menjelaskan tentang pemahaman terhadap reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan sekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan *dispositional attributions* dan *situational attributions*. *Dispositional attributions* atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kemampuan, kepribadian, dan persepsi diri. Sedangkan *Situational attributions* atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai sosial dan pandangan masyarakat.

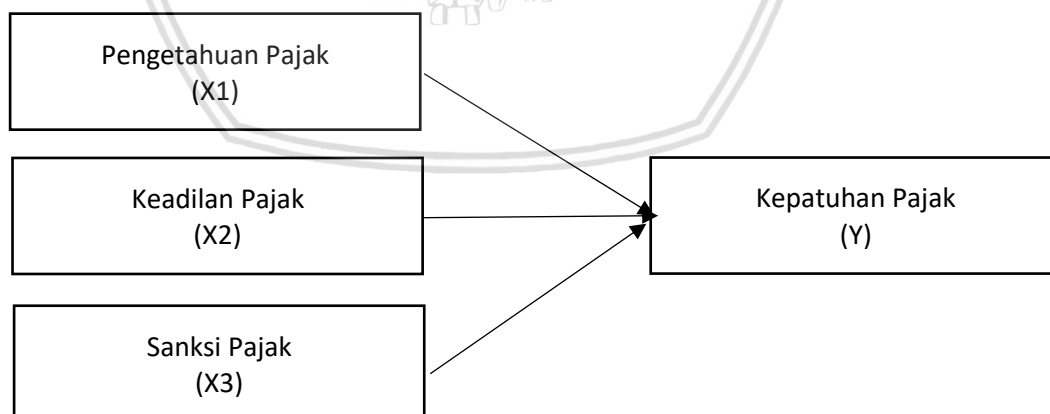
Heider (1958) menyatakan bahwa kekuatan internal dan kekuatan eksternal bersama-sama dalam menentukan perilaku seseorang. Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap perilaku seseorang untuk meningkatkan kewajibannya.

Perilaku kepatuhan wajib pajak sesuai dengan teori atribusi dapat ditentukan dari faktor internal berupa pengetahuan terhadap peraturan perpajakan yang ada di Indonesia dan faktor eksternal yang dapat dilihat dari keadilan pajak dan sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini ingin menguji pengaruh pengetahuan pajak, keadilan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Model yang digunakan akan dijelaskan pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan terkait pajak perpajakan adalah hal penting yang wajib pajak perlu ketahui agar wajib pajak tahu apa saja hak dan kewajiban mereka selaku wajib pajak. Dyah, *et.al* (2015) menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Disebutkan dalam penelitiannya seseorang yang mempunyai pengetahuan biasanya akan mempunyai kecerdasan dan kesadaran dalam bertindak, terlebih seseorang tersebut mengetahui akan manfaat bagi dirinya sendiri. Ketika seseorang mempunyai pengetahuan akan pentingnya membayar pajak, maka dia secara otomatis dia akan mempunyai sikap patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak. Karena seseorang tersebut sadar akan fungsi dan manfaatnya jika dia patuh dalam membayar pajak.

Pernyataan serupa juga ditunjukkan oleh Basit (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menguraikan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.6.2 Pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Keadilan pajak merupakan salah satu hal yang penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu penerimaan pajak. Pajak yang secara psikologis bagi wajib pajak merupakan sebuah beban akan bertambah berat jika merasa adanya ketidakadilan pajak yang dikenakan karena itu, ketika keadilan pajak

tidak dapat dirasakan oleh wajib pajak tentu wajib pajak akan semakin enggan dalam mematuhi undang-undang pajak yang berlaku. Pemerintah juga perlu memberikan rasa adil dalam perpajakan yang ditetapkan di Indonesia. Seperti tarif pengenaan pajak yang sesuai kemampuan dan juga pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Yuliana dan Isharijadi (2014), menyatakan bahwa keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak. Keadilan pajak merupakan salah satu hal penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu penerimaan pajak.

Pernyataan serupa juga ditunjukkan oleh Asbar (2014) yang menyatakan bahwa keadilan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan semakin tinggi keadilan pajak yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menguraikan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.6.3 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi pajak merupakan alat kontrol untuk mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban perpajakannya, dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat oleh wajib pajak apabila tidak membayar akan secara otomatis membuat wajib pajak berfikir kembali untuk melakukan pelanggaran. Karena dengan mereka melakukan pelanggaran, mereka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi hingga sanksi pidana.

Septarini (2015) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena dengan pengenaan sanksi pajak akan memberikan efek jera kepada wajib pajak.

Pernyataan serupa juga ditunjukkan oleh Prawirasuta & Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menguraikan hipotesis sebagai berikut:

H_3 = Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.7 Penelitian terdahulu

Prawirasuta dan Setiawan (2016) menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul “Integritas Sebagai Pemoderasi Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penentuan sampel dilakukan melalui metode *convenience sampling*. Ukuran sampel dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dengan sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Damajanti (2015) menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di Kota Semarang”. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam menjalankan peraturan perpajakan. Variabel dalam penelitian ini adalah pengetahuan pelaporan, pengetahuan pembayaran dan pengetahuan terhadap perhitungan pajak. Populasi penelitian ini yaitu wajib pajak perorangan non karyawan di kota Semarang. Sampel dipilih dengan metode

convenience sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden namun hanya 75 hasil kuesioner yang dapat diolah. Hasil dari penelitian ini pengetahuan pelaporan, pengetahuan pembayaran dan pengetahuan perhitungan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak berlaku terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dyah *et.al* (2015) menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini yang menjadi populasi adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 98 wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Hasil dari penelitiannya adalah bahwa pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jember.

Septarani (2015) menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pelayanan fiskus, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Merauke”. Penelitian ini menggunakan 4 variabel, yaitu pelayanan, sanksi, dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel bebas, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Merauke yang seluruhnya berjumlah 24.313 orang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 187 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling*. Teknik ini dilakukan dengan memilih secara acak melalui

pengundian nama wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Merauke. Hasil penelitiannya, menyatakan bahwa bahwa pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak masing-masing juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi pajak memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Merauke karena dengan adanya pengenaan sanksi pajak dapat memberikan pelajaran atau *deterrent effect* kepada wajib pajak.

Asbar (2014) menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru”. Penelitian ini terdapat enam variabel, yang terdiri dari lima variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kepuasan pelayanan perpajakan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan, sedangkan variabel dependennya adalah tingkat kepatuhan WPOP. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru dengan karakteristik WPOP kurang bayar yang terdaftar sampai tahun 2012 yang berjumlah 52.003. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dipilih secara acak (*simple random sampling*). Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan rumus Solvin dengan hasil 100 responden. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa tingkat kepuasan pelayanan pajak, pemahaman pajak, keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak dan kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Basit (2014) menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari persepsi kontrol perilaku, pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan survei lapangan yaitu dengan mengambil sampel di lapangan secara langsung dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Wilayah Jakarta Timur. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 178 responden. Hasil dari penelitian tersebut adalah persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pengetahuan pajak dan keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Syahdan dan Rani (2014) menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul “Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitiannya mengatakan bahwa fenomena terjadi saat ini pembayar pajak cenderung menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variable yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti mencoba menganalisa sejauh mana dimensi keadilan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak khususnya usaha kecil dan menengah (UKM). Penelitiannya mendapatkan hasil bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh ketatnya sistem perpajakan yang berlaku dibandingkan persepsi mereka mengenai keadilan perpajakan. Adil atau tidaknya

sistem perpajakan yang berlaku tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Yuliana dan Isharijadi (2014) menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Madiun”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap, norma subjektif dan keadilan pajak orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan di KPP Pratama Madiun. Populasi penelitian ini sejumlah 39.390 wajib pajak orang pribadi yang tepat waktu dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Madiun. Sampel dalam penelitian berjumlah 482 responden dengan menggunakan teknik Random atau sampel acak di Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Hasil dari penelitian ini adalah variabel sikap, norma subjektif dan keadilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun.

Harefa (2013) menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan pengaruh sikap wajib pajak terhadap sanksi administrasi berupa denda, sikap wajib pajak terhadap otoritas pajak layanan dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta, Kota Senen. Jumlah sampel ditentukan 112 orang wajib pajak. Hasil penelitian ini adalah sikap tingkat wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi administratif berupa denda dan layanan

otoritas pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan sikap wajib pajak terhadap perpajakan kesadaran efek positif secara signifikan pada kepatuhan pajak.



Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil penelitian
1	Prawirasuta dan Putu (2016)	Variabel Independen: -Sanksi -Kesadaran Variabel Dependen: -Kepatuhan wajib pajak	Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Damajanti (2015)	Variabel Independen: -Pengetahuan Variabel Dependen: -Kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh dengan kepatuhan wajib pajak
3	Dyah, Handayani & Sulasmiati (2015)	Variabel Independen: -Pengetahuan -Pelayanan Fiskus Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
4	Septarini (2015)	Variabel Independen: -Pelayanan Fiskus -Sanksi -Kesadaran Pajak Variabel Dependen: -Kepatuhan wajib pajak	Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Asbar (2014)	Variabel Independen: -Kepuasan Pelayanan -Pemahaman -Keadilan -Sanksi -Kesadaran Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Kepuasan Pelayanan, Pemahaman dan Keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
6	Basit (2014)	Variabel Independen: -Persepsi Kontrol Perilaku -Pengetahuan -Keadilan Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh sedangkan Pengetahuan dan Keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Lanjutan Tabel 2.1

No	Nama & Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil penelitian
7	Syahdan dan Rani (2014)	Variabel Independen: -Keadilan Pajak Variabel Dependen: -Kepatuhan wajib pajak	Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
8	Yuliana dan Isharijadi (2014)	Variabel Independen: -Sikap -Norma Subjektif -Keadilan Pajak Variabel Dependen: -Kepatuhan wajib pajak	Sikap, Norma Subjektif dan Keadilan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
9	Harefa (2013)	Variabel Independen: -Sanksi Pajak -Pelayanan Fiskus -Kesadaran Pajak Variabel Dependen: -Kepatuhan wajib pajak	Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut Chandrarin (2017: 122), dalam penelitian kuantitatif adalah jenis data yang berupa angka-angka yang berasal dari perhitungan masing-masing atribut pengukuran variabel.

Penelitian ini menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data penelitian dengan langsung turun ke lapangan. Menurut Jogiyanto (2008: 117), metode survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data.

3.2 Populasi

Populasi adalah kumpulan objek penelitian dari mana data akan dijangkau atau dikumpulkan, (Neolaka, 2014: 41). Populasi dalam penelitian bisa berupa orang atau individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan. Jumlah wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Malang Selatan sampai periode 2016 adalah 14.280.

Berikut gambaran umum tentang KPP Pratama Malang Selatan sebagai objek penelitian akan ditampilkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Gambaran Umum KPP Pratama Malang Selatan

Nama	KPP Pratama Malang Selatan
Tanggal/ Tahun Berdiri	31 Mei 2007
Alamat	Jalan Merdeka Utara No. 3, Malang
Cakupan Wilayah Kerja	3 Kecamatan (Klojen, Sukun, Kedungkandang)
Jumlah Wajib Pajak Pekerja Bebas	14.280

Sumber: KPP Pratama Malang Selatan, 2017.

3.3 Sampel

Menurut Chandrarin (2017: 125), sampel merupakan kumpulan subjek yang mewakili populasi. Sampel yang diambil harus mempunyai karakteristik yang sama dengan dengan populasinya dan harus mewakili anggota populasinya. Jumlah populasi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan, tidak semua wajib pajak tersebut akan menjadi objek penelitian ini. Pengambilan sampel penelitian ini, peneliti menggunakan rumus ukuran sampel Slovin. Adapun rumus pengambilan sampel tersebut adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N\alpha^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

α : Toleransi Ketidaktelitian

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{14.280}{1+(14.280)(0,1)^2} = \frac{14.280}{143,8} = 99,30$$

Berdasarkan rumus untuk menentukan jumlah sampel diatas maka jumlah sampel yang akan diambil oleh penulis setelah dilakukan pembulatan yaitu sebanyak 100 responden. 100 kuesioner akan disebarkan langsung oleh peneliti kepada wajib pajak pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan, 100 kuesioner itu telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Nonprobability sampling*. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Convenience Sampling*. Teknik ini didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel diambil/ terpilih karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat.

3.4 Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Mustafa (2009: 92), data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan pengukuhan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya (subjek penelitian). Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat penelitiannya. Kuesioner merupakan suatu daftar yang berisi rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti dan bertujuan untuk mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku dan karakteristik beberapa orang utama didalam suatu organisasi. Pendistribusian dan pengumpulan kuesioner dilakukan dengan

cara didistribusikan langsung kepada responden dalam hal ini wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan, selain itu pengumpulan kuesioner juga dilakukan dengan cara mendatangi langsung ketempat pekerja bebas bekerja.

Menurut Chandrarin (2017: 124), data sekunder adalah data yang berasal dari pihak atau lembaga yang telah menggunakan atau mempublikasikannya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data jumlah WPOP terdaftar juga didapatkan langsung dari KPP Pratama Malang Selatan dengan melakukan beberapa prosedur perizinan yang ditetapkan oleh kantor wilayah DJP Jawa Timur III.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian lapangan atau survei yaitu dengan melakukan peninjauan dan pengamatan langsung ke objek penelitian, dalam hal ini KPP Malang Selatan dan menyebar kuesioner secara langsung kepada responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara menyebar sebanyak 60 kuesioner dengan mendatangi wajib pajak pekerja bebas dan sisanya sebanyak 40 kuesioner disebarkan di KPP Malang Selatan.

Sebagian besar penelitian kuantitatif umumnya memang menggunakan teknik kuesioner dalam rangka pengumpulan data. Menurut Jogiyanto (2008: 145), ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum menyusun kuisisioner dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan daftar pertanyaan yang sesuai dengan variabel penelitian beserta dimensi pengukurannya.
2. Melakukan pilot test. Untuk menguji apakah kuesioner dapat dipahami oleh responden.
3. Setelah kuesioner diyakini dapat dipahami oleh responden, maka dilakukan penyebaran kuisisioner kepada responden yang dijadikan sampel.

Alasan peneliti menggunakan teknik kuesioner ini adalah karena beberapa kelebihan yang menjadi pertimbangan tersendiri bagi peneliti. Beberapa kelebihan dari teknik kuisisioner adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner secara relatif lebih efisien untuk sumber data yang banyak.
2. Hasil dari kuesioner biasanya tidak mencantumkan identitas responden, maka hasilnya dapat lebih objektif.

3.6 Variabel dan Indikator Penelitian

3.6.1 Variabel bebas (Variabel Independen)

Variabel bebas atau independen (X) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang akan menjadi sebab terjadinya perubahan pada variabel terikat (Y). Penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel independen (X), yaitu:

1. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak terkait dengan sistem dan peraturan perpajakan yang telah ada. Menurut Basit (2014), pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Wajib pajak perlu tahu mengenai tata cara seluruh prosedur perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

Burton (2014: 189), mengatakan terdapat 4 (empat) indikator, yaitu kepemilikan NPWP, pengetahuan mengenai hak dan kewajiban, pengetahuan mengenai sanksi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan kuesioner yang telah dilakukan sebelumnya oleh Witono (2008), yakni sebagai berikut:

- a. Kepemilikan NPWP: Saya memiliki pengetahuan tentang pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan.
- b. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak: Saya memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
- c. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan: Saya memiliki pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.
- d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak: Saya memiliki pengetahuan tentang PTKP, PKP dan tarif pajak.

Variabel ini diukur dengan skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang paling sering dan paling luas digunakan dalam penelitian, karena skala ini memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan tingkat intensitas sikap/ perilaku atau perasaan responden (Mustafa, 2009: 76). Responden akan diminta untuk mengisi kuesioner dan jawaban dari kuesioner tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert yang dibagi kedalam 5 kategori yakni: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS). Masing-masing jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan diberi nilai sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki nilai 1, Tidak Setuju (TS) memiliki

nilai 2, Netral (N) memiliki nilai 3, Setuju (S) memiliki nilai 4, Sangat Setuju (SS) memiliki nilai 5.

2. Keadilan Pajak

Keadilan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak atau masyarakat merasa adil terkait peraturan dan sistem perpajakan yang berlaku. Menurut Syahdan dan Rani (2014), persepsi wajib pajak mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan selain itu persepsi wajib pajak juga mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak. Wajib pajak akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajibannya jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil. Menurut Burton (2014: 189), terdapat 4 (empat) kriteria dalam keadilan pajak, yakni prinsip keadilan, prinsip dalam kemampuan membayar, keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan kuesioner yang dilakukan oleh Witono (2008), yakni sebagai berikut:

- a. Prinsip manfaat (*benefit principle*): Menurut saya, pajak penghasilan yang dibayarkan terlalu tinggi jika mempertimbangkan manfaat yang diberikan oleh pemerintah seperti membangun fasilitas umum yang bersifat penting.
- b. Keadilan dalam kemampuan membayar (*ability to pay*): Pembagian beban pajak di antara masing-masing wajib pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya yaitu seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak.

- c. Keadilan horizontal (*horizontal equity*): Secara umum, saya merasa bahwa pajak penghasilan yang dibebankan pada saya dilakukan secara adil.
- d. Keadilan vertikal (*vertical equity*): Menurut saya, wajib pajak yang penghasilannya lebih tinggi harus dikenakan tarif yang lebih tinggi.

Variabel ini diukur dengan skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang paling sering dan paling luas digunakan dalam penelitian, karena skala ini memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan tingkat intensitas sikap/ perilaku atau perasaan responden (Mustafa, 2009: 76). Responden akan diminta untuk mengisi kuesioner dan jawaban dari kuesioner tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert yang dibagi kedalam 5 kategori yakni: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS). Masing-masing jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan diberi nilai sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki nilai 1, Tidak Setuju (TS) memiliki nilai 2, Netral (N) memiliki nilai 3, Setuju (S) memiliki nilai 4, Sangat Setuju (SS) memiliki nilai 5.

3. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah tindakan hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan atas pelaksanaan tindakan yang dilarang yang dilakukan oleh wajib pajak. Menurut (Mardiasmo, 2013: 59), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Veronica (2015), terdapat 4 (empat) indikator dalam sanksi pajak, yakni

sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak, sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar, sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan kuesioner yang dilakukan oleh Sentanu dan Setiawan (2016), yakni sebagai berikut:

- a. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar: Wajib Pajak akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya
- b. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar: Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi jika tidak membayar/kurang membayar pajak terutang saat jatuh tempo.
- c. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan: Wajib Pajak akan diberi sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan
- d. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku: Wajib Pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Variabel ini diukur dengan skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang paling sering dan paling luas digunakan dalam penelitian, karena skala ini memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan tingkat intensitas sikap/ perilaku atau perasaan responden (Mustafa, 2009: 76). Responden akan diminta untuk mengisi kuesioner dan jawaban dari kuesioner tersebut diukur dengan

menggunakan skala Likert yang dibagi kedalam 5 kategori yakni: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS). Masing-masing jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan diberi nilai sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki nilai 1, Tidak Setuju (TS) memiliki nilai 2, Netral (N) memiliki nilai 3, Setuju (S) memiliki nilai 4, Sangat Setuju (SS) memiliki nilai 5.

3.6.1 Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Harinurdin (2009), kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material. Menurut Burton (2014: 35), terdapat terdapat 4 kriteria, yakni kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam mengambil, mengisi dan menyampaikan SPT, kepatuhan dalam pembayaran pajak tepat waktu, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan kuesioner yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ngadiman dan Huslin (2015), yakni sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri: Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri
2. Kepatuhan untuk mengambil, mengisi dan menyampaikan SPT: Saya mampu mengambil, mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar

3. Kepatuhan wajib pajak membayar pajak terutang tepat waktu: Banyaknya tempat pembayaran dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan: Saya tidak boleh mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur/ menunda pembayaran pajak.

Variabel ini diukur dengan skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang paling sering dan paling luas digunakan dalam penelitian, karena skala ini memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan tingkat intensitas sikap/ perilaku atau perasaan responden (Mustafa, 2009: 76). Responden akan diminta untuk mengisi kuesioner dan jawaban dari kuesioner tersebut diukur dengan menggunakan skala Likert yang dibagi kedalam 5 kategori yakni: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS). Masing-masing jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan diberi nilai sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki nilai 1, Tidak Setuju (TS) memiliki nilai 2, Netral (N) memiliki nilai 3, Setuju (S) memiliki nilai 4, Sangat Setuju (SS) memiliki nilai 5.

3.7 Metode Analisis Data

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan program SmartPLS versi 3. Alasan peneliti menggunakan PLS adalah:

1. Metode statistik ini tepat digunakan dalam menguji efek prediksi hubungan antar variabel laten dalam suatu model.

2. PLS dapat dijalankan pada sampel dengan jumlah kecil, tidak mensyaratkan data berdistribusi normal, dan dapat menguji model penelitian dengan dasar teori lemah (Abdillah dan Hartono, 2015).
3. PLS dapat menggabungkan metode regresi dan analisis faktor dalam satu teknik statistik (Abdillah dan Hartono, 2015)

Abdillah dan Hartono (2015) menjelaskan tahapan dalam menjalankan PLS adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan diagram jalur.
2. Menentukan berapa banyak blok (variabel laten) yang akan dibangun dengan indikator pada tiap variabel laten.
3. Melakukan estimasi tiap variabel laten sebagai total bobot indikatornya.
4. Memperbarui “*inner relations*” (hubungan struktural antar variabel laten) kemudian memperbarui “*outer relations*” (hubungan indikator dengan variabel laten).
5. Melakukan estimasi regresi sederhana tiap indikator terhadap proksi variabel laten dan regresi berganda proksi variabel laten terhadap seluruh indikatornya.
6. Melakukan estimasi “*case values*” untuk setiap observasi dengan menggunakan bobot formatif atau proporsional terhadap *loading* dengan mempertimbangkan kendala varian (F) = 1, selanjutnya pengestimasian berlanjut hingga perubahan bobot adalah kecil.

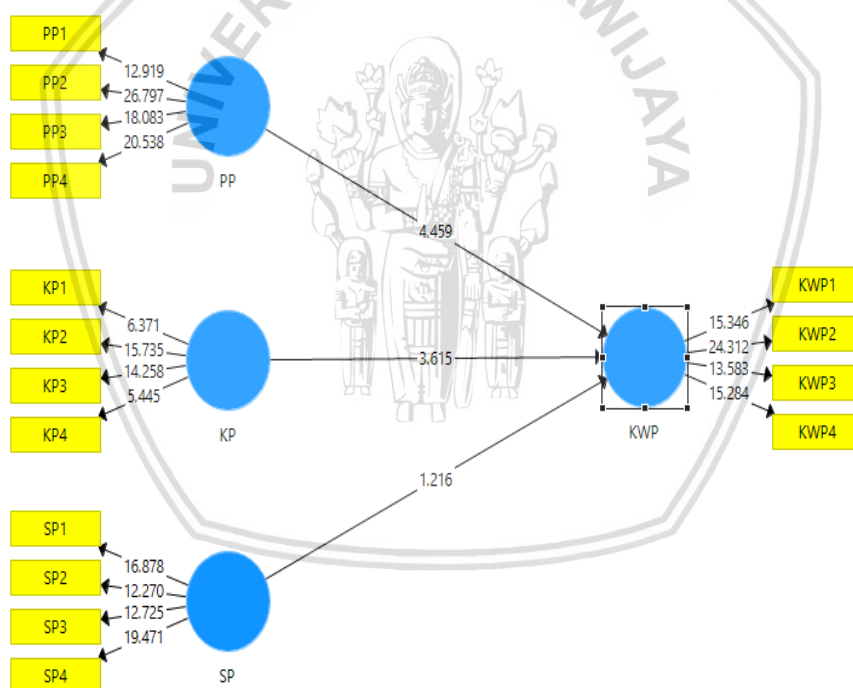
3.8 Model Spesifikasi

Model spasifikasi dalam PLS terdiri dari dua set hubungan yaitu: *outer loading* dan *inner loading*. Berikut adalah penjelasannya:

1. Outer Model

Outer model merupakan hubungan antara kontruk dengan indikator. Berikut ini merupakan konstruk diagram jalur, persamaan *outer model* dalam penelitian ini adalah:

Gambar 3.1
Model Diagram Jalur



Keterangan: PP (Pengetahuan Pajak), KP (Keadilan Pajak), SP (Sanksi Pajak), KWP (Kepatuhan wajib pajak)

Berdasarkan diagram jalur pada gambar 3.1, terlihat bahwa terdapat tiga jalur dan terdiri dari empat konstruk. Konstruk dibentuk dengan cara reflektif yaitu diukur dengan menggunakan indikator-indikator pamanifestasinya. Konstruk pengetahuan pajak dimanifestasikan oleh empat

indikator yaitu kepemilikan NPWP, pengetahuan hak dan kewajiban, pengetahuan mengenai sanksi dan pengetahuan mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Konstruk keadilan pajak dimanifestasikan oleh empat indikator yaitu prinsip manfaat, keadilan dalam kemampuan membayar, keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Konstruk sanksi dimanifestasikan oleh sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan, sanksi dilaksanakan dengan tegas, sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran dan penerapan sanksi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. *Inner Model*

Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan R^2 untuk konstruk dependen, nilai koefisien *path* atau *t-values* tiap *path* untuk uji nilai signifikansi antar konstruk dalam model struktural. Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin baik, seperti contoh nilai R^2 sebesar 0,7 artinya variasi perubahan variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen sebesar 70%, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Nilai *path* koefisien atau *inner model* menunjukkan tingkat signifikan dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien *path* atau *inner model* yang ditunjukkan oleh nilai *T-statistic*, harus diatas 1,96 untuk hipotesis *two tailed* dan diatas 1,64 untuk hipotesis *one tailed* untuk pengujian pada alpha 5% dan power 80%.

3.9 Evaluasi Model Hipotesis Penelitian

Evaluasi model dalam PLS dilakukan dengan melakukan evaluasi pada *outer model* dan *inner model*. *Outer model* merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas model. *Inner model* merupakan model struktural untuk menilai hubungan antara konstruk.

3.9.1 *Outer Model*

Outer Model merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas suatu model (Abdillah dan Hartono, 2015). Uji validitas terkait seberapa baik suatu instrumen yang dibuat mengukur konsep tertentu yang ingin diukur (Abdillah dan Hartono, 2015). Peneliti dalam penelitian ini akan menguji reliabilitas item pada setiap konstruk melalui pengujian validitas konstruk, yaitu uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan.

Uji reliabilitas adalah suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan-*error free*) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen (Abdillah dan Hartono, 2015). Parameter pengukuran dan *outer model* adalah berikut ini:

Tabel 3.2
Parameter Uji Validitas dalam model pengukuran PLS

Uji Validitas	Parameter	Rule of Thumbs	Keterangan
Konvergen	Faktor <i>Loading</i>	Lebih dari 0,7	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator dengan <i>factor loading</i> dibawah 0,4 harus dihapus dari model - Indikator dengan <i>factor loading</i> antara 0,4-0,7 sebaiknya dilakukan analisis terlebih dahulu dampak dari keputusan menghapus indikator tersebut terhadap nilai AVE dan <i>Composite Reliability</i> (Solihin dan Ratmono,2013)
	<i>Average Variance Extracted</i> (AVE)	Lebih dari 0,5	-
	<i>Communalitiy</i>	Lebih dari 0,5	-
Diskriminan	Akar AVE dan Korelasi variabel laten	Akar AVE > Korelasi variabel laten	-
	<i>Cross loading</i>	Lebih dari 0,7	-
Reliabilitas	<i>Cronbach's Alpha</i>	Lebih dari 0,6	-
	<i>Composite Reliability</i>	Lebih dari 0,7	-

Sumber: (Abdillah dan Hartono, 2015)

3.9.2 Inner Model (Model Struktural)

Abdillah dan Hartono (2015) menjelaskan bahwa *inner model* merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kuualitas antar variabel laten. Model struktural PLS diuji dengan mengukur nilai R^2 dan koefisien *path* melalui

perbandingan *T-statistics* dengan nilai *t-table* pada output smartPLS. Berikut adalah parameter pengukuran inner model dalam PLS:

1. R^2

Digunakan ketika mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 menggambarkan seberapa besar variabel laten dependen dapat dipengaruhi oleh variabel laten independennya.

2. Nilai koefisien *path*

Digunakan untuk menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Nilai koefisien *path* dijelaskan melalui nilai *T-statistics*. Nilai *T-statistics* akan dibandingkan dengan nilai *t-table* dalam pengujian hipotesis. *T-table* untuk hipotesis *one tail* adalah 1,64. Nilai *T-statistics* yang lebih besar dari nilai *t-table* menandakan hipotesis diterima.

3.10 Hasil Pilot Test

Pilot test dalam studi ini dilakukan pada 30 responden mahasiswa Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berikut ini merupakan hasil pilot test:

3.10.1 Hasil Uji Validitas Pilot Test

Uji validitas terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan, yaitu:

1. Validitas Konvergen

Pengujian yang pertama adalah uji validitas konvergen. Parameter yang digunakan dalam uji validitas konvergen adalah, nilai faktor *loading* lebih dari 0,7, nilai AVE lebih dari 0,5, nilai *communality* lebih dari 0,5.

Sholihin dan Ratmono menyatakan bahwa indikator dengan nilai *loading* di bawah 0,4 harus dihapuskan dari model sedangkan indikator dengan nilai *loading* antara 0,4-0,7 sebaiknya dilakukan analisis terlebih dahulu dampak dari keputusan menghapus indikator tersebut pada nilai AVE dan *composite reliability*. Apabila dengan menghapus indikator tersebut dapat meningkatkan nilai AVE dan *composite reliability*, maka indikator dengan nilai *loading* 0,4-0,7 lebih baik dihapuskan. Berikut ini merupakan hasil uji validitas konvergen dari *pilot test*:

Tabel 3.3
Hasil Outer Loading Pilot Test

Konstruk	1PP	2KP	3SP	4KWP
1PP1	0,647			
1PP2	0,696			
1PP3	0,899			
1PP4	0,770			
2KP1		0,720		
2KP2		0,778		
2KP3		0,949		
2KP4		0,928		
3SP1			0,909	
3SP2			0,957	
3SP3			0,722	
3SP4			0,637	
4KWP1				0,725
4KWP2				0,678
4KWP3				0,670
4KWP4				0,860

Keterangan: 1PP (Pengetahuan Pajak), 2KP (Keadilan Pajak), 3SP (SanksiPajak), 4KWP (Kepatuhan Wajib Pajak)

Tabel 3.4
Nilai AVE dan *Communality Pilot Test*

Konstruk	AVE	<i>Communality</i>
1PP	0,524	0,524
2KP	0,752	0,752
3SP	0,844	0,844
4KWP	0,574	0,574

Keterangan: 1PP (Pengetahuan Pajak), 2KP (Keadilan Pajak), 3SP (SanksiPajak), 4KWP (Kepatuhan Wajib Pajak)

Tabel 3.3 menunjukkan nilai faktor *loading*. Tabel tersebut diketahui nilai faktor *loading* lebih dari 0,7. Dengan demikian, konstruk dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini sudah valid. Tabel 3.4 menunjukkan nilai AVE dan *communality* setiap konstruk adalah lebih dari 0,5. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dan indikator yang digunakan telah memenuhi persyaratan dari validitas konvergen.

2. Uji Validitas Diskriminan

Pengujian yang kedua adalah uji validitas diskriminan. Suatu instrumen dikatakan lolos uji validitas diskriminan apabila memenuhi dua parameter, yaitu nilai akar AVE > korelasi variabel laten dan nilai *cross loading* lebih dari 0,7 dalam satu variabel. Hasil akar AVE dan korelasi variabel laten dari *pilot test* dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan hasil *cross loading* dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.5
Nilai Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten *Pilot Test*

Konstruk	Akar AVE	1PP	2KP	3SP	4KWP
1PP	0,724	1	-	-	-
2KP	0,867	0,588	1	-	-
3SP	0,919	0,700	0,808	1	-
4KWP	0,758	0,510	0,736	0,434	1

Keterangan: 1PP (Pengetahuan Pajak), 2KP (Keadilan Pajak), 3SP (SanksiPajak), 4KWP (Kepatuhan Wajib Pajak)

Tabel 3.6
Nilai *Cross Loading Pilot Test*

Konstruk	1PP	2KP	3SP	4KWP
1PP1	0,647	0,130	0,461	0,000
1PP2	0,696	0,701	0,474	0,192
1PP3	0,899	-0,647	0,742	0,362
1PP4	0,770	0,401	0,558	0,272
2KP1	0,729	0,720	0,594	0,773
2KP2	0,525	0,778	0,316	-0,261
2KP3	0,420	0,949	0,628	-0,807
2KP4	0,350	0,928	0,430	0,713
3SP1	-0,513	0,635	0,909	0,454
3SP2	0,712	0,726	0,957	0,467
3SP3	0,478	0,768	0,722	0,524
3SP4	0,424	0,664	0,637	0,644
4KWP1	0,726	0,384	-0,401	0,725
4KWP2	0,685	0,269	0,652	0,678
4KWP3	0,537	0,412	0,236	0,670
4KWP4	0,706	0,611	-0,297	0,860

Keterangan: 1PP (Pengetahuan Pajak), 2KP (Keadilan Pajak), 3SP (SanksiPajak), 4KWP (Kepatuhan Wajib Pajak)

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat diketahui bahwa akar AVE konstruk bernilai lebih besar daripada korelasi variabel laten antar konstruk. Berdasarkan Tabel 3.6 diketahui bahwa nilai *cross loading* dari indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk dan sub-konstruk pengetahuan pajak, keadilan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak adalah lebih

dari 0,7 dalam satu variabel. Dengan demikian, melalui uji validitas diskriminan dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dan indikator yang digunakan telah memenuhi persyaratan dari validitas diskriminan.

Terpenuhinya uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan dapat diketahui bahwa konstruk dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini dinilai valid.

3.10.2 Hasil Uji Reliabilitas *Pilot Test*

Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi responden dalam menjawab item pertanyaan dalam kuesioner atau instrumen yang digunakan oleh peneliti. Parameter yang digunakan untuk menilai reliabilitas adalah nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,6 dan *composite reliability* lebih dari 0,7. Hasil nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability Pilot Test*

Konstruk	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
1PP	0,820	0,866
2KP	0,700	0,858
3SP	0,816	0,915
4KWP	0,871	0,902

Keterangan: 1PP (Pengetahuan Pajak), 2KP (Keadilan Pajak), 3SP (Sanksi Pajak), 4KWP (Kepatuhan Wajib Pajak)

Berdasarkan Tabel 3.7, diketahui bahwa seluruh konstruk yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,6 dan *composite reliability* lebih dari 0,7. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk yang digunakan dalam studi ini memenuhi uji reliabilitas sehingga alat

ukur yang digunakan dalam penelitian ini dinilai konsisten untuk dapat digunakan. Kesimpulan dari uji validitas dan uji reliabilitas, dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa instrumen pengukuran atau kuesioner dalam studi ini telah valid reliabel. Oleh karena itu, kuesioner dapat digunakan untuk pengujian pada sampel yang sesungguhnya.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Malang Selatan. Metode survei dipilih sebagai metode yang tepat dalam penelitian ini. Metode survei dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada responden secara langsung atau dengan cara menemui langsung sampel secara satu per satu. Pengumpulan data dalam penelitian ini membutuhkan waktu hampir 2 minggu.

Kuesioner yang disebarkan ke wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan adalah sebanyak 100 kuesioner, jumlah ini sesuai dengan perhitungan sampel dari populasi yang ada dengan menggunakan rumus Slovin. Dari hasil penyebaran kuesioner, peneliti mendapatkan kembali seluruh kuesioner yang disebar hal ini dikarenakan peneliti menunggu kuesioner yang disebar sehingga kuesioner kembali sesuai jumlah yang telah disebar namun, dari total seluruh kuesioner terdapat 3 (tiga) kuesioner yang tidak dapat diolah karena ada beberapa soal yang tidak diisi.

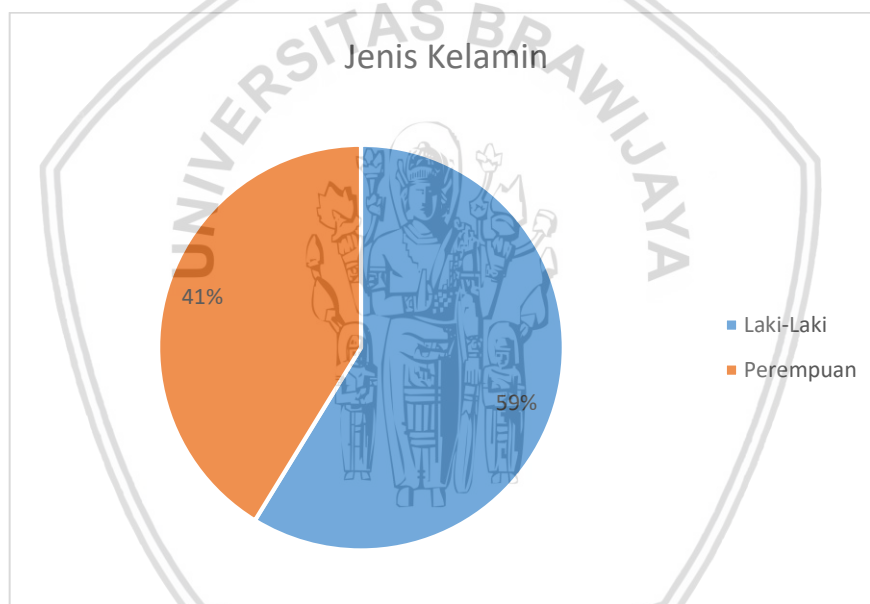
Tabel 4.1
Pembagian Pengembalian Kuesioner

Jumlah Sampel	100
Kuesioner yang disebar	100
Kuesioner yang tidak kembali	0
Kuesioner yang dapat diolah	97
Kuesioner yang tidak dapat diolah	3
Tingkat pengembalian yang dapat digunakan	97%

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Berikut deskripsi gambaran secara umum mengenai data responden yang menjadi data pada penelitian ini, deskripsi digambarkan dalam bentuk diagram-diagram dan disertai penjelasannya. Gambar 4.1 menyajikan komposisi responden berdasarkan jenis kelamin. Hasil dari survei yang dilakukan, responden terbanyak dalam penelitian ini adalah laki-laki dengan jumlah 57 orang dan perempuan dengan jumlah 40 orang.

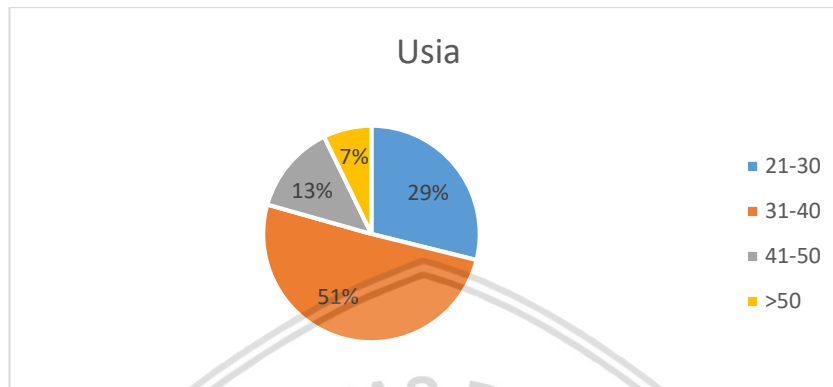
Gambar 4.1
Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Data Primer diolah, 2018

Gambar selanjutnya menunjukkan komposisi berdasarkan tingkat usia dari responden yang ditunjukkan melalui gambar 4.2. Hasil dari survei yang dilakukan, peneliti mendapatkan beragam tingkatan usia dari responden. Tingkatan usia responden terbanyak adalah pada tingkatan usia 31-40 tahun sebanyak 49 orang, kemudian 20-30 tahun sebanyak 28 orang, 41-50 tahun sebanyak 13 orang dan yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 7 orang.

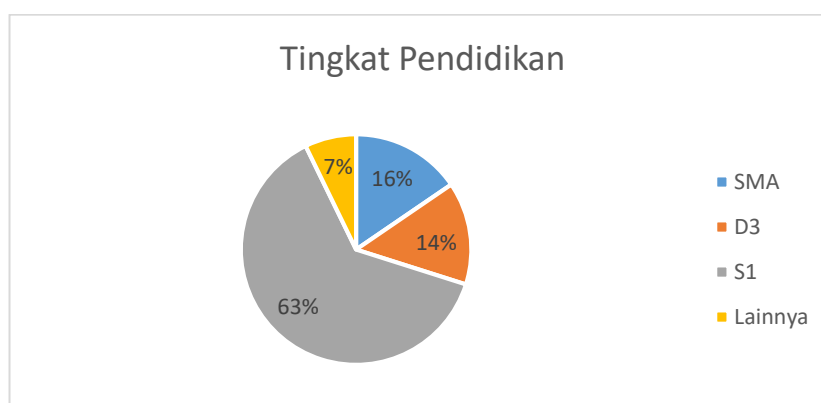
Gambar 4.2
Komposisi Responden Berdasarkan Usia



Sumber: Data primer diolah, 2018

Gambar selanjutnya menunjukkan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang telah diemban responden yang ditunjukkan melalui gambar 4.3. Hasil dari survei yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa responden dengan tingkat pendidikan S1 menjadi yang terbanyak, yaitu sebanyak 61 orang, kemudian dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 15 orang, D3 sebanyak 14 orang, dan responden dengan tingkat pendidikan diluar kategori tersebut atau disebut lainnya sebanyak 7 orang.

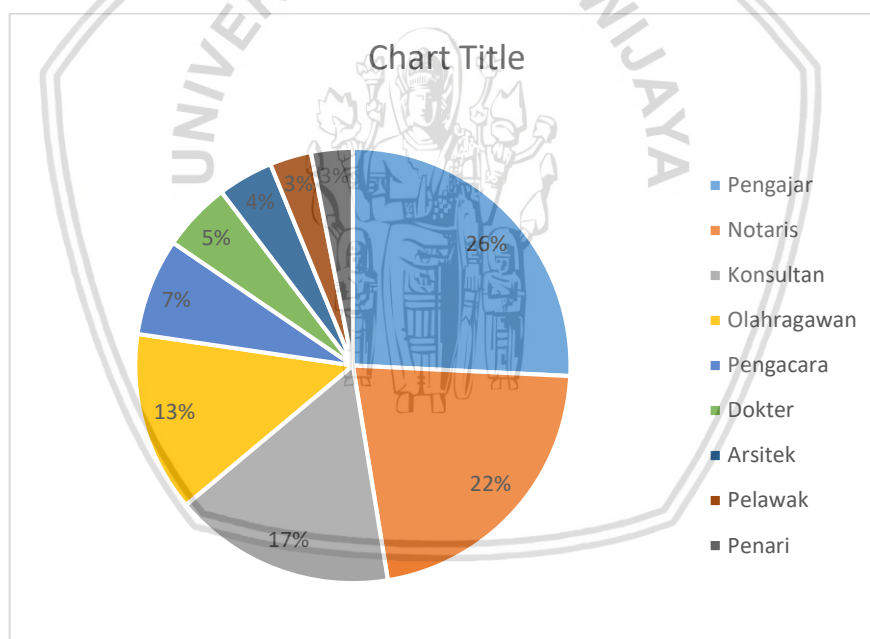
Gambar 4.3
Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Data primer diolah, 2018

Gambar selanjutnya menunjukkan komposisi berdasarkan jenis pekerjaan yang ditunjukkan melalui gambar 4.4. Hasil dari survei yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa responden dengan jenis pekerjaan pengajar dengan jumlah 25 orang, dengan jenis pekerjaan notaris sebanyak 21 orang, jenis pekerjaan konsultan 16 orang, jenis pekerjaan olahragawan sebanyak 13 orang, jenis pekerjaan pengacara 7 orang, jenis pekerjaan dokter 5 orang, jenis pekerjaan arsitek sebanyak 4 orang, jenis pekerjaan penari dan pelawak 3 orang.

Gambar 4.4
Jenis Pekerjaan



Sumber: Data Primer diolah, 2018

Berikut adalah ringkasan data responden dari berbagai karakteristik yang didapatkan dari responden dalam pengisian kuesioner yang disebar. Ringkasan data responden akan ditunjukkan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Ringkasan Tabel Responden

Karakteristik		Frekuensi	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	57	59%
	Perempuan	40	41%
	Total	97	100%
Usia	20-30 tahun	28	29%
	31-40 tahun	49	51%
	41-50 tahun	13	13%
	>50 tahun	7	7%
	Total	97	100%
Tingkat Pendidikan	SMA	15	16%
	D3	14	14%
	S1	61	63%
	lainnya	7	7%
	Total	97	100%
Jenis Pekerjaan	Pengajar	25	26%
	Notaris	21	22%
	Konsultan	16	17%
	Olahragawan	13	13%
	Pengacara	7	7%
	Dokter	5	5%
	Arsitek	4	4%
	Pelawak	3	3%
	Penari	3	3%
	Total	97	100%

Sumber: Data diolah, 2018

4.2 Deskriptif Jawaban Responden

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden terhadap indikator-indikator yang ada pada kuesioner. Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan mengolah jawaban responden berdasarkan indikator. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, dan distribusi daya yang meliputi mean, median, dan deviasi standar (Hartono, 2010).

4.2.1 Tanggapan Responden Terhadap Pengetahuan Pajak

Deskripsi jawaban responden terhadap konstruk pengetahuan pajak disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Pengetahuan Pajak

Indikator	N	Minimum	Maksimum	Mean	Median	Dev Standar
1PP1	97	2.00	5.00	3.99	4.00	0.70
1PP2	97	2.00	5.00	4.07	4.00	0.60
1PP3	97	2.00	5.00	3.92	4.00	0.77
1PP4	97	1.00	5.00	3.59	4.00	0.91

Sumber: Lampiran 2 Tabel 1

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, mean (rata-rata), median (nilai tengah), dan deviasi standar dari jawaban responden untuk setiap indikator konstruk pengetahuan pajak. Berdasarkan tabel tersebut skala minimum untuk indikator 1PP1, 1PP2, 1PP3 adalah 2 (Tidak Setuju) dan untuk indikator 1PP4 adalah 1 (Sangat Tidak Setuju). Skala maksimum untuk semua indikator adalah 5 (Sangat Setuju). Nilai median pada seluruh indikator konstruk ini adalah 4. Secara keseluruhan, nilai deviasi standar setiap indikator tidak ada yang melebihi nilai mean, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut memiliki penyimpangan data yang rendah. Ketika nilai deviasi standar rendah, maka semakin rendah pula penyimpangan data dari rata-rata hitungannya (Hartono, 2010)

4.2.2 Tanggapan Responden Terhadap Keadilan Pajak

Deskripsi jawaban responden terhadap konstruk Keadilan Pajak disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Konstruk Keadilan Pajak

Indikator	N	Minimum	Maksimum	Mean	Median	Dev Standar
2KP1	97	1.00	5.00	3.42	4.00	1.00
2KP2	97	1.00	5.00	4.12	4.00	0.82
2KP3	97	1.00	5.00	3.69	4.00	0.84
2KP4	97	2.00	5.00	4.05	4.00	0.84

Sumber: Lampiran 2 Tabel 1

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, mean (rata-rata), median (nilai tengah), dan deviasi standar dari jawaban responden untuk setiap indikator konstruk Keadilan Pajak. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui skala minimum untuk indikator 2KP1, 2KP2, 2KP3 adalah 1 (Sangat Tidak Setuju) dan untuk indikator 2KP4 adalah 2 (Tidak Setuju). Skala maksimum untuk semua indikator adalah 5 (Sangat Setuju). Nilai median pada seluruh indikator konstruk ini adalah 4. Secara keseluruhan, nilai deviasi standar setiap indikator tidak ada yang melebihi nilai mean, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut memiliki penyimpangan data rendah. Ketika nilai deviasi standar rendah, maka semakin rendah pula penyimpangan data dari rata-rata hitungannya (Hartono, 2010).

4.2.3 Tanggapan Responden Terhadap Sanksi Pajak

Deskripsi jawaban responden terhadap konstruk Sanksi Pajak disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Kontruk Sanksi Pajak

Indikator	N	Minimum	Maksimum	Mean	Median	Dev Standar
3SP1	97	1.00	5.00	3.88	4.00	0.85
3SP2	97	1.00	5.00	3.82	4.00	0.81
3SP3	97	1.00	5.00	4.09	4.00	0.81
3SP4	97	1.00	5.00	4.15	4.00	0.69

Sumber: Lampiran 2 Tabel 1

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, mean (rata-rata), median (nilai tengah), dan deviasi standar dari jawaban responden untuk setiap indikator kontruk Sanksi Pajak. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui skala minimum untuk semua indikator adalah 1 (Sangat Tidak Setuju). Skala maksimum untuk semua indikator adalah 5 (Sangat Setuju). Nilai median pada seluruh indikator adalah 4. Secara keseluruhan, nilai deviasi standar setiap indikator tidak ada yang melebihi nilai mean, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut memiliki penyimpangan data yang rendah. Ketika nilai deviasi standar rendah, maka semakin rendah pula penyimpangan data dari rata-rata hitungnya (Hartono, 2010).

4.2.4 Tanggapan Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Deskripsi jawaban responden terhadap konstruk kepatuhan wajib pajak disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	N	Minimum	Maksimum	Mean	Median	Dev Standar
4KWP1	97	2.00	5.00	3.92	4.00	0.73
4KWP2	97	2.00	5.00	3.80	4.00	0.81
4KWP3	97	3.00	5.00	4.27	4.00	0.62
4KWP4	97	2.00	5.00	4.03	4.00	0.67

Sumber: Lampiran 2 Tabel 1

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, mean (rata-rata), median (nilai tengah), dan deviasi standar dari jawaban responden untuk setiap indikator konstruk Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui skala minimum untuk indikator 4KWP1, 4KWP2, 4KWP4 adalah 2 (Tidak Setuju) dan untuk indikator 4KWP3 adalah 3 (Netral). Skala maksimum untuk semua indikator adalah 5 (Sangat Setuju). Nilai Median pada seluruh indikator adalah 4. Secara keseluruhan, nilai deviasi standar setiap indikator tidak ada yang melebihi nilai mean, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut memiliki penyimpangan data yang rendah. Ketika nilai deviasi standar rendah, maka semakin rendah pula penyimpangan data dari rata-rata hitungannya (Hartono, 2010).

4.3 Evaluasi Model Hipotesis Penelitian

Evaluasi model dalam PLS dilakukan dengan melakukan evaluasi pada *outer model* dan *inner model*. *Outer model* merupakan model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas model. *Inner model* merupakan model struktural untuk menilai hubungan antara konstruk (Abdillah dan Hartono, 2015). Model dalam penelitian ini terdiri dari empat konstruk, yaitu pengetahuan pajak, keadilan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

4.3.1 Uji Outer Model

Uji *outer model* dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas dari model yang digunakan oleh peneliti. Berikut ini merupakan tahapan uji *outer model*:

1. Validitas Konvergen

Parameter yang digunakan dalam pengujian validitas konvergen adalah nilai AVE (*Average Varians Extracted*) dan nilai *Communality* lebih dari 0,5 dan nilai *outer loading* lebih dari 0,4 – 0,7 (Soilihin dan Ratmono, 2013). Berikut merupakan hasil uji validitas konvergen:

Tabel 4.7
Nilai Outer Loadings

Konstruk	1PP	2KP	3SP	4KWP
1PP1	0,773			
1PP2	0,861			
1PP3	0,814			
1PP4	0,827			
2KP1		0,651		
2KP2		0,798		
2KP3		0,830		
2KP4		0,597		
3SP1			0,882	
3SP2			0,836	
3SP3			0,799	
3SP4			0,860	
4KWP1				0,791
4KWP2				0,839
4KWP3				0,744
4KWP4				0,759

Sumber: Lampiran 2 Tabel 2

Keterangan: 1PP (Pengetahuan Pajak), 2KP (Keadilan Pajak), 3SP (SanksiPajak), 4KWP (Kepatuhan Wajib Pajak)

Tabel 4.8
Nilai AVE dan *Communality*

Konstruk	AVE	<i>Communality</i>
1PP	0,671	0,671
2KP	0,527	0,527
3SP	0,714	0,714
4KWP	0,615	0,615

Sumber: Lampiran 2 Tabel 3

Keterangan: 1PP (Pengetahuan Pajak), 2KP (Keadilan Pajak), 3SP (SanksiPajak), 4KWP (Kepatuhan Wajib Pajak)

Tabel 4.7 menunjukkan nilai *outer loading*. Tabel tersebut terdapat 2 konstruk yang nilai *outer loading* kurang dari 0,7. Berdasarkan pendapat dari Sholihin dan Ratmono (2013), peneliti dapat tidak menghapus nilai *outer loading* antara 0,4 – 0,7 jika indikator tersebut dapat meningkatkan AVE dan *composite reliability* di atas nilai batasnya.

Tabel 4.8 menunjukkan nilai AVE dan *communality*. Tabel tersebut diketahui bahwa nilai AVE dan *communality* dari setiap konstruk diatas 0,5. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa indikator pada masing-masing konstruk sudah valid.

2. Validitas Diskriminan

Tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian valitas diskriminan. Parameter yang digunakan dalam pengujian validitas diskriminan adalah nilai akar AVE lebih dari korelasi variabel laten dan nilai *cross loading* adalah lebih dari 0,7 dalam satu variabel (Abdillah dan Hartono, 2015).

Nilai dari akar AVE dan korelasi variabel laten dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Nilai Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten

Konstruk	Akar AVE	1PP	1KP	1SP	1KWP
1PP	0,819	1	-	-	-
2KP	0,726	0,436	1	-	-
3SP	0,845	0,315	0,454	1	-
4KWP	0,784	0,613	0,569	0,417	1

Sumber: Lampiran 2 Tabel 4

Berdasarkan tabel 4.9, dapat diketahui bahwa nilai akar AVE lebih dari nilai korelasi variabel laten di setiap konstruk. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa nilai setiap konstruk sudah valid. Hasil dari nilai *cross loading* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Nilai Cross Loadings

Konstruk	1PP	2KP	3SP	4KWP
1PP1	0,773	0,342	0,291	0,528
1PP2	0,861	0,335	0,281	0,503
1PP3	0,814	0,348	0,237	0,470
1PP4	0,827	0,402	0,220	0,505
2KP1	0,266	0,651	0,336	0,324
2KP2	0,402	0,798	0,282	0,511
2KP3	0,301	0,830	0,359	0,425
2KP4	0,272	0,597	0,372	0,358
3SP1	0,301	0,417	0,882	0,369
3SP2	0,311	0,424	0,836	0,380
3SP3	0,165	0,353	0,799	0,328
3SP4	0,279	0,333	0,860	0,329
4KWP1	0,448	0,453	0,253	0,791
4KWP2	0,587	0,458	0,291	0,839
4KWP3	0,415	0,363	0,237	0,744
4KWP4	0,456	0,496	0,503	0,759

Keterangan: 1PP (Pengetahuan Pajak), 2KP (Keadilan Pajak), 3SP (SanksiPajak), 4KWP (Kepatuhan Wajib Pajak)

Berdasarkan tabel 4.10, dapat diketahui bahwa nilai *cross loading* adalah lebih dari 0,7 atau antara 0,4 – 0,7. Berdasarkan dari kedua tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa konstruk dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi uji validitas diskriminan.

3. Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menggunakan dua parameter, yaitu nilai *cronbach's alpha* adalah lebih dari 0,6 dan nilai *composite reliability* adalah lebih dari 0,7 (Abdillah dan Hartono, 2015). Nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11
Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability

Konstruk	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
1PP	0,836	0,891
2KP	0,696	0,814
3SP	0,866	0,909
4KWP	0,791	0,864

Sumber: Lampiran 2 Tabel 3

Keterangan: 1PP (Pengetahuan Pajak), 2KP (Keadilan Pajak), 3SP (SanksiPajak), 4KWP (Kepatuhan Wajib Pajak)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* adalah lebih dari 0,6 dan nilai *composite reliability* adalah lebih dari 0,7. Hasil dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa data dan hasil pengukuran yang dilakukan adalah reliabel.

Simpulan akhir yang di peroleh dari ketiga pengujian yang telah dilakukan (uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan dan uji reliabilitas), menunjukkan konstruk dan indikator dalam penelitian ini valid dan reliabel, karena telah memenuhi syarat validitas konvergen, diskriminan dan reliabilitas.

4.3.2 Uji Inner Model

Setelah melakukan uji *outer model*, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah uji inner model. Terdapat dua parameter pengukuran yang digunakan dalam uji *inner model*, yaitu nilai R^2 dan *path coefficient*.

1. Nilai R^2

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 juga digunakan untuk mengukur persentase variansi konstruk endogen yang dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Nilai R^2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.12
Nilai R^2

Konstruk	R^2
4KWP	0,503

Sumber: Lampiran 2 Tabel 3

Keterangan: 4KWP (Kepatuhan Wajib Pajak)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai R^2 konstruk kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,503. Artinya persentase variansi konstruk kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh konstruk pengetahuan pajak, keadilan pajak dan sanksi pajak sebesar 50,3%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh konstruk lain diluar model.

2. Nilai *Path Coefficient*

Nilai *path coefficient* menunjukkan tingkat signifikan dalam pengujian hipotesis. Apabila nilai *path coefficient* yang ditunjukkan nilai *T-statistics* $> 1,64$, maka hipotesis penelitian (H_a) diterima. Namun apabila

nilai $T\text{-statistics} < 1,64$, maka hipotesis penelitian (H_a) ditolak. Nilai $T\text{-statistics}$ dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.13
Nilai Path Coefficient

Hipotesis	Konstruk	Original Sampel	T-statistics	Keputusan
H1	1PP-4KWP	0,431	4,494	Diterima
H2	2KP-4KWP	0,319	3,626	Diterima
H3	3SP-4KWP	0,136	1,136	Ditolak

Sumber: Lampiran 2 Tabel 5

Keterangan: 1PP (Pengetahuan Pajak), 2KP (Keadilan Pajak), 3SP (Sanksi Pajak), 4KWP (Kepatuhan Wajib Pajak)

4.4 Pengujian Hasil Hipotesis

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka didapatkan hasil bahwa pengetahuan pajak dan keadilan pajak diterima atau berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan untuk sanksi pajak mendapatkan hasil ditolak atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah penjelasannya:

1. Hipotesis 1

Hipotesis 1 menyatakan bahwa konstruk pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai beta (β) positif, yaitu sebesar 0,431 dan nilai $T\text{-statistics}$ dari konstruk pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4,494 atau $>1,64$. Hasil tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Hipotesis 1 diterima.

2. Hipotesis 2

Hipotesis 2 menyatakan bahwa konstruk keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai beta (β) positif, yaitu sebesar 0,319 dan nilai *T-statistics* dari konstruk keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 3,626 atau $> 1,64$. Hasil tersebut menjelaskan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Hipotesis 2 diterima.

3. Hipotesis 3 menyatakan bahwa konstruk sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai beta (β) positif, yaitu sebesar 0,136 dan nilai *T-statistics* dari konstruk sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 1,136 atau $< 1,64$. Konstruk sanksi dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Hipotesis 3 ditolak.

4.5 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menguji beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, faktornya berupa pengetahuan pajak, keadilan pajak dan sanksi pajak. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa pengetahuan pajak dan keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut uraian diskusi hasil pengujian hipotesis:

4.5.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak ini merupakan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak atas segala aspek tentang perpajakan. Pengetahuan pajak meliputi pengetahuan mengenai hak dan kewajiban, pengetahuan mengenai sanksi dan pengetahuan mengenai tarif pajak. Pengetahuan pajak merupakan hal penting untuk dimiliki setiap wajib pajak agar mengerti bahwa membayar pajak dilakukan demi kepentingan negara. Pengetahuan tentang perpajakan tersebut diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai undang-undang.

Hipotesis 1 dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai beta (β) positif yaitu sebesar 0,431 dan nilai *T-statistics* dari kontruk pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 4,494 atau $>1,64$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil peneliti ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dyah, et.al (2015) dan Basit (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Damajanti (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan akan mempunyai kecerdasan dan kesadaran dalam bertindak, terlebih jika wajib pajak tersebut mengetahui akan manfaat yang akan didapat dari melaksanakan kewajibannya. Wajib pajak yang

mempunyai pengetahuan akan pentingnya membayar pajak, secara otomatis akan mempunyai sikap patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kualitas pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya.

4.5.2 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Keadilan pajak merupakan salah satu unsur penting yang dapat mempengaruhi orang dalam membayar pajak. Dalam hal ini wajib pajak akan enggan untuk membayar pajak apabila merasa adanya ketidakadilan dalam sistem perpajakan yang dijalankan di suatu negara. Adilnya sistem perpajakan yang diterapkan di suatu negara, wajib pajak akan merasa pajak yang dibayarkannya dikelola dengan baik dan benar oleh negara.

Hipotesis 2 dalam penelitian ini menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai beta (β) positif, yaitu sebesar 0,319 dan nilai *T-statistics* dari konstruk keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 3,626 atau $>1,64$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka keadilan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2014) dan Asbar (2014) yang menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahdan dan Rani (2014) yang menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan sistem perpajakan yang adil dapat mempengaruhi persepsi yang positif terkait perpajakan. Manfaat yang dirasakan dari hasil pembayaran pajak akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena ketika wajib pajak merasakan ada timbal balik yang nyata dan bermanfaat maka wajib pajak akan memiliki persepsi bahwa pajak yang dibayarkan tidak mahal sehingga mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini karena semakin tinggi keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap pajak maka akan meningkatkan kesukarelaan untuk membayar pajak.

4.5.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 3 dalam penelitian ini menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai beta (β) positif, yaitu sebesar 0,136 dan nilai T-statistics dari konstruk sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 1,136 atau $<1,64$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Harefa (2013) dan penelitian yang dilakukan oleh Masruroh (2013) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septarini (2015) dan Prawirasuta (2016) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terjadi karena pemahaman wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang

memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberi efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak namun kenyataan dengan sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera kepada wajib pajak sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman tentang sanksi yang minim dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan. Hal ini dapat diartikan dengan adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga harus diimbangi dengan diberikannya pemahaman tentang sanksi pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi denda serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi denda terhadap wajib pajak. Sanksi dalam perpajakan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan *self assessment system* agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Sanksi perpajakan dibuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan namun pelanggaran perpajakan akan terus terjadi jika pemberian sanksi yang ada tidak dikenakan dengan tegas. Ketegasan aparat pajak dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak merupakan salah satu cara mewujudkan kepatuhan. Apabila aparat pajak tidak tegas dalam memberikan sanksi maka wajib pajak tidak akan patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, keadilan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pekerja bebas di KPP Pratama Malang Selatan. Responden dalam penelitian ini sejumlah 97 WPOP yang ada di KPP Pratama Malang Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan sistem perpajakan yang adil khususnya di Kota Malang. Fasilitas umum yang memadai, jalanan yang halus diberbagai daerah di Kota Malang menjadi bukti bahwa pemerintah telah mengelola dana perpajakan dengan tepat dan adil yang kemudian manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Kota Malang. Hal ini membuktikan bahwa semakin terbentuknya persepsi adil tentang perpajakan oleh WPOP, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

3. Sanksi pajak tidak memberikan pengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk mematuhi perpajakan. Hal ini berarti sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak tidak mampu menciptakan perilaku dalam mematuhi peraturan perpajakan karena dengan memberikan sanksi pajak dinilai tidak efektif untuk diterapkan, terbukti dari ketidakmampuan faktor tersebut dalam mendorong wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerja bebas untuk membayar pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dalam menguji hipotesis, memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

1. Beberapa responden tidak mengisi kuesioner dengan teliti. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya 3 (tiga) kuesioner yang tidak dapat diolah datanya karena kuesioner yang diisi tidak lengkap.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dalam penelitian ini hanya terdiri dari 3 variabel yaitu pengetahuan pajak, keadilan pajak dan sanksi pajak sehingga menghasilkan nilai R^2 sebesar 0,503 atau 50,3%, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

5.3 Saran

Saran dan rekomendasi yang peneliti berikan adalah:

1. Untuk Pemerintah

Pemerintah diharapkan menerapkan sistem perpajakan yang adil serta memberikan timbal balik secara merata melalui penyediaan fasilitas umum dan pembangunan-pembangunan diseluruh wilayah. Pemerintah juga perlu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak agar wajib pajak merasa tau akan perlunya membayar pajak dan pemerintah juga harus memberikan penyuluhan tentang pajak diberbagai daerah.

2. Peneliti selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya disarankan agar mengecek ulang kuesioner yang telah diisi, agar tidak ada kuesioner yang tidak diisi oleh responden.
- b. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah lebih banyak variabel seperti sosialisasi pajak, kualitas pelayanan pajak atau kesadaran pajak agar penelitian ini dapat lebih berkembang.
- c. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih memperluas cakupan wilayah atau menambah populasi pada penelitian selanjutnya agar hasil yang didapat lebih akurat dan lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W. & Hartono, J. (2015). *“Partial Least Square: Alternatif Structural Equation Modeling dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset
- Asbar, A. K. (2014). “Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru”. *Jurnal Fekon*, Vol. 1 No.2, 1-15
- Basit, A. (2014). “Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak dan Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Tekun*, Vol. 5 No.1, 23-48
- Burton, R. (2014). *Kajian Perpajakan dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Chandrarini, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Selemba Empat
- Damajanti, A. (2015). “Pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di Kota Semarang”. *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol. 17(2), 12-28
- Damayanti, T. W. (2004). “Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga)”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.X No.1, 109-128
- Dyah, D. K. N, Handayani, S. R. & Sri, S. (2015). “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)”. *Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan*, Vol. 5 No.1, 1-8
- Harefa, M. I. (2013). “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen)”. *Jurnal Tekun*, Vol. 4 No. 1, 105-127
- Harinurdin, E. (2009). “Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 16 No. 2, 96-104
- Hartono, Jogiyanto (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Jogiyanto. (2008). *Metode Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset

- Jogiyanto. (2007). *Sistem Informasi Keprilaku*. Yogyakarta: Andi Offset
- Kurniawati, M. & Toly, A. A. (2014). "Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat". *Tax & Accounting Review*, Vol. 4 No.2, 1-12
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset
- Marti, L. O. (2010). "Taxpayers' Attitudes and Tax Compliance Behaviour in Kenya". *African Journal of Business & Management*, Vol. 1, 112-122
- Masruroh, S. (2013). "Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 2, 1-15
- Mustafa, Z. (2009). *Mengurai Variable hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Narbuko, C. & Achmadi, H. A. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Neolaka, A. (2014). *Metode Penelitian dan Statistik*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ngadiman & Huslin, D. (2015). "Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi*, Vol. XIX. No. 2, 225-241
- Oladipupo, A. O. & Obazee, U. (2016). "Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria". *iBusiness*, Vol. 8, 1-9
- Palil, M. R. (2005). "Taxpayer's Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria". *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol 7. No. 1, 11-21
- Prawirasuta, M. W. & Setiawan, P. E. (2016). "Integritas Sebagai Pemoderasi Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 16 No.2, 1661-1686
- Priantara, D. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media

- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga
- Sentanu, I. N. W. & Setiawan, P. E. (2016). "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel". *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.16 No.1, 306-332
- Septarini, D. F. (2015). "Pengaruh Pelayanan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Merauke". *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, Vol. VI No. 1, 29-43
- Siti, R. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Solihin, M. & Ratmono, D. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 untuk Hubungan Non-Linier dalam Penelitian Sosial dan Bismis*. Yogyakarta: Andi.
- Suharsono, A. (2015). *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sumarsan, T. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks
- Syahdan, S. A. & Rani, A. P. (2014). "Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal InFestasi*, Vol.10 No. 1, 64-72
- Veronica, A. (2015). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru". *Jom. FEKON* Vol. 2 No. 2, 1-15
- Witono, B. (2008). "Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.7 No.2, 196-208
- Yuliana, R. & Isharijadi. (2014). "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun". *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 3 No.2, 75-85